



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Banjar adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Kabupaten Banjar semula terdiri atas 15 Kecamatan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dimekarkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru, dan Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kota Banjarbaru. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 dibentuklah Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Sambung Makmur. Kemudian melalui Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 dibentuk Kecamatan Paramasan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 membentuk Kecamatan Telaga Bauntung. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Dibentuklah Kecamatan Cintapuri Darussalam. Sekarang secara administratif Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Aluh-Aluh	82,48	19	
2.	Beruntung Baru	61,42	12	
3.	Gambut	129,30	12	2
4.	Kertak Hanyar	45,83	10	3
5.	Tatah Makmur	35,47	13	
6.	Sungai Tabuk	147,30	20	1
7.	Martapura	42,03	19	7



No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
8.	Martapura Timur	29,99	20	
9.	Martapura Barat	149,38	14	
10.	Astambul	216,50	22	
11.	Karang Intan	215,35	26	
12.	Aranio	1.166,35	12	
13.	Sungai Pinang	458,65	11	
14.	Paramasan	560,85	4	
15.	Pengaron	433,25	12	
16.	Sambung Makmur	134,65	7	
17.	Mataraman	148,40	15	
18.	Simpang Empat	141,10	15	
19.	Telaga Bauntung	158,00	4	
20.	Cintapuri Darussalam	428,29	11	
	Jumlah	4.668,5	277	13

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017.

Kabupaten Banjar berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Banjar berbatasan dengan :

Sebelah utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebelah timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebelah selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.

Sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.

Jumlah penduduk Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah 555.611 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 281.233 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 274.378 jiwa. Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Banjar tahun 2020 sebagai berikut: usia 0-19 tahun 182.278 jiwa. Usia 20-44 tahun 224.534 jiwa. Usia 45-59 tahun adalah 99.723 jiwa. Sedangkan 60-75 tahun adalah 42.440 jiwa. Pada tahun



2020 tercatat 21,56 persen penduduk berada di Kecamatan Martapura yang merupakan persentase tertinggi, kemudian diikuti Kecamatan Sungai Tabuk sebesar 10,8 persen dan Kecamatan Kertak Hanyar sebesar 7,1 persen. Sedangkan persentase penduduk terendah adalah di Kecamatan Telaga Bauntung sebesar 0,58 persen kemudian diikuti Kecamatan Paramasan sebesar 0.68 persen.

Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2020 didukung 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, 6 Badan, 23 Dinas, 20 Kecamatan dengan jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 6288 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 2630 orang dan perempuan sebanyak 3658 orang.

II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Banjar

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	% Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,94	69,18	0,34 %
2.	Angka Kemiskinan	15.910 (2,72%)	15.120 (2,55%)	-4,96 %
3.	Angka Pengangguran	2,89	3,87	33,91 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,52	-1,96	-56,6%
5.	Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku)	28.287.000	27.742.000	-1,93%
	Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga konstan)	20.352.000	19.688.000	-3,26
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Banjar (2021).



1) Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah 69,18 masuk kategori sedang mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu 69,94. IPM dapat dilihat dari komponen pembentuknya yaitu Angka Harapan Hidup tahun 2020 adalah 67,21 tahun; Harapan Lama Sekolah adalah 12,44 tahun; Rata-rata Lama Sekolah adalah 7,35 tahun; dan Pengeluaran riil/per kapita adalah 11.013 ribu rupiah. Semua komponen IPM mengalami kenaikan kecuali Pengeluaran riil/per kapita yang mengalami penurunan sebelumnya di tahun 2019 adalah 12.681 ribu rupiah. Hal ini dikarenakan pengeluaran rumah tangga menurun akibat penurunan daya beli masyarakat akibat pembatasan sosial Pandemi Covid-19.

2) Angka Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Banjar pada tahun 2020 (Rp 462.375) mengalami kenaikan sebesar 7,67 persen dibanding GK tahun 2019 (Rp 429.422). Sedangkan pada tahun 2016 GK di Kabupaten Banjar adalah (Rp. 360.494). Meskipun garis kemiskinan naik tiap tahunnya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 angka kemiskinan dalam hal ini jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar sebesar 2,55 persen atau 15.120 jiwa mengalami penurunan sebanyak 0,17 persen, dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2,72 persen atau sebesar 15.910 jiwa. Tahun 2020 Kabupaten Banjar masih sebagai Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin yang paling rendah di Kalimantan Selatan.

3) Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan sebesar 33,91% dari 2,89 persen di tahun 2019 ke 3,87 persen di tahun 2020. Jumlah Angkatan kerja di tahun 2020 adalah 318.377 orang dengan jumlah pengangguran sebesar 12.317 orang dan yang bekerja adalah 306.060 orang. Pandemi Covid-19 yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi minus berdampak pada meningkatnya pengangguran di Kabupaten Banjar.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2020 sebesar -1,96 persen menurun dibanding tahun 2019 sebesar 4,52 persen. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Banjar disumbangkan oleh 17,65



persen oleh kategori pertanian, 14,67 persen kategori perdagangan, dan 13,50 persen kategori pertambangan. Semua wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi minus hal ini sebagai dampak pandemi covid-19 yaitu penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan sejalan dengan pelemahan daya beli masyarakat.

5) Pendapatan Per Kapita (dilihat dari PDRB per kapita)

Ukuran kesejahteraan memang sulit dicakup dalam satu indikator yang komprehensif, dan untuk data pendapatan per kapita tidak tersedia di instansi-instansi Kabupaten Banjar. Namun data yang mendekati dengan pendapatan per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku untuk tahun 2019 dan 2020 yaitu Rp. 28.287.000 dan Rp. 27.742.000. Sedang PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2019 dan 2020 yaitu Rp. 20.352.000 dan Rp. 19.688.000.

6) Ketimpangan Pendapatan

Data koefisien gini Kabupaten Banjar untuk tahun 2019 dan 2020 tidak tersedia oleh Badan Pusat Statistik. Nilai koefisien gini Kabupaten Banjar tahun 2018 adalah sebesar 0,33 berarti di Kabupaten Banjar distribusi pendapatan penduduk cukup merata. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, pada tahun 2018 secara rata-rata ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Banjar lebih kecil dibandingkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum.

III. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan, ada 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

a) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 6 - 6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian kinerja dalam pelaksanaan realisasi indikator tersebut adalah 55,52 persen dengan data indikator Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD di wilayah Kabupaten Banjar sebanyak 10.396 jiwa yang terdiri atas peserta didik perempuan



sebanyak 5.086 jiwa dan 5.310 jiwa peserta didik laki-laki, sementara itu sebagai indikator pembandingan adalah jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Banjar sebanyak 18.726 jiwa.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjar masih ada sekitar 44,48 persen anak di usia PAUD yang belum mengikuti PAUD atau mungkin mengikuti pendidikan di Daerah lain atau lembaga pendidikan lainnya.

b) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 89,15 persen dengan data indikator jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar sebanyak 53.265 jiwa yang terdiri atas data dari sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan sebanyak 39.447 jiwa, data dari sekolah di bawah naungan Kementerian Agama sebanyak 13.099 jiwa dan yang mengikuti Paket A sebanyak 719 jiwa, sementara itu sebagai indikator pembandingan adalah Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Banjar sebanyak 59.745 jiwa.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjar masih ada sekitar 10,85 persen anak di usia pendidikan dasar yang belum mengikuti pendidikan dasar atau mungkin mengikuti pendidikan di Daerah lain atau lembaga pendidikan lainnya.

c) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Capaian kinerja dalam pelaksanaan realisasi indikator tersebut adalah 68,32 persen dengan indikator jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama sebanyak 19.407 jiwa yang terdiri atas data dari sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan sebanyak 10.902 jiwa dan data dari sekolah di bawah naungan Kementerian Agama sebanyak 6.405 jiwa, sementara itu sebagai indikator pembandingan adalah jumlah anak usia 13-15 tahun di Kabupaten Banjar sebanyak 28.404 jiwa.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjar masih ada sekitar 31,68 persen anak di usia Sekolah Menengah Pertama yang belum mengikuti



pendidikan dasar atau mungkin mengikuti pendidikan di Daerah lain atau lembaga pendidikan lainnya.

- d) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 22,71 persen dengan indikator jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 5.924 jiwa, sementara itu sebagai indikator perbandingan adalah jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan sebanyak 26.085 jiwa.

2. Urusan Kesehatan

Dalam penyelenggaraan Urusan Kesehatan, ada 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 0,11 persen yang terdiri atas jumlah daya tampung Rumah Sakit Rujukan sebanyak 631 dengan perbandingan total jumlah penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2020 sebanyak 555.611 jiwa.

Jumlah daya tampung tersebut berdasarkan pada perhitungan jumlah tempat tidur pasien di Rumah Sakit yang berada di wilayah Kabupaten Banjar dan Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan.

- b) Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 16,67 persen yang terdiri atas jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi sebanyak 1 (satu) rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha dengan akreditasi Utama dengan perbandingan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Banjar sebanyak 6 (enam) Rumah Sakit. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar.



c) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 100 persen yang terdiri atas jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sebanyak 11.028 jiwa dengan perbandingan jumlah ibu hamil di Kabupaten Banjar sebanyak 11.028 jiwa.

d) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 99,28 persen yang terdiri atas jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sebanyak 10.819 jiwa dengan perbandingan jumlah ibu bersalin di Kabupaten Banjar sebanyak 10.897 jiwa.

Ada sekitar 0,72 persen yang tidak terdata melakukan persalinan di Kabupaten Banjar, kemungkinan proses persalinan tersebut dilaksanakan di pelayanan persalinan lainnya atau di pusat pelayanan kesehatan di daerah lain.

e) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 100 persen yang terdiri atas jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 10.899 jiwa dengan perbandingan jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Banjar sebanyak 10.899 jiwa.

f) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 96,41 persen yang terdiri atas jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 39.601 jiwa dengan perbandingan jumlah balita di Kabupaten Banjar sebanyak 41.077 jiwa.

Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2020, pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan memberlakukan pembatasan beberapa pelayanan dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19, sehingga terdapat balita yang tidak bisa melakukan kunjungan ke beberapa Pusat Kesehatan di Kabupaten Banjar.

g) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 74,31 persen yang terdiri atas jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 54.156 jiwa



dengan perbandingan jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Banjar sebanyak 72.877 jiwa.

Pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2020 pusat pembelajaran atau sekolah di Kabupaten Banjar hanya berjalan normal selama 1 triwulan (Januari – Maret), kemudian terjadi pandemi covid-19 sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka dan sekolah ditutup, hal ini menyulitkan tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan di sekolah-sekolah.

h) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 48,81 persen yang terdiri atas jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 188.240 jiwa dengan perbandingan jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Banjar sebanyak 385.691 jiwa.

Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2020, pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan memberlakukan pembatasan beberapa pelayanan dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19.

i) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 77,86 persen yang terdiri atas jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 36.000 jiwa dengan perbandingan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten Banjar sebanyak 46.235 jiwa.

Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah covid-19, dimana usia 60 tahun ke atas tergolong rentan terjangkit virus covid-19 sehingga terjadi penurunan kunjungan warga ke pusat pelayanan kesehatan.

j) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 82,55 persen yang terdiri atas jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 27.987 jiwa dengan perbandingan jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Banjar sebanyak 33.903 jiwa.



Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah covid-19 sehingga masyarakat pada umumnya yang sehat mengurangi intensitas ke pusat pelayanan kesehatan.

- k) Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 96,50 persen yang terdiri atas jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.439 jiwa dengan perbandingan jumlah penderita diabetes melitus di Kabupaten Banjar sebanyak 5.636 jiwa. Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah covid-19 sehingga masyarakat pada umumnya yang sehat mengurangi intensitas ke pusat pelayanan kesehatan.
- l) Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
- Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 100 persen yang terdiri atas jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 1.191 jiwa dengan perbandingan jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Banjar sebanyak 1.191 jiwa.
- m) Persentase orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar
- Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 83,73 persen yang terdiri atas jumlah penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.374 jiwa dengan perbandingan jumlah penderita tuberkulosis di Kabupaten Banjar sebanyak 5.224 jiwa. Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah covid-19 sehingga masyarakat pada umumnya yang sehat mengurangi intensitas ke pusat pelayanan kesehatan.
- n) Persentase orang dengan resiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV) mendapatkan pelayanan deteksi dini *human immunodeficiency virus* (HIV) sesuai standar



Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 85,96 persen yang terdiri atas jumlah orang dengan resiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV) yang mendapatkan pelayanan deteksi dini *human immunodeficiency virus* (HIV) sesuai standar sebanyak 10.888 jiwa dengan perbandingan jumlah orang dengan resiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV) di Kabupaten sebanyak 12.666 jiwa.

Capaian kinerja ini tidak bisa maksimal dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah covid-19 sehingga masyarakat pada umumnya yang sehat mengurangi intensitas ke pusat pelayanan kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum ada 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 37,54 persen terdiri dari luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten Banjar sebesar 565 ha dan luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten sebesar 1.505 ha.

- b) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 62,50 persen terdiri dari luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten Banjar sebesar 2.500 m dan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten Banjar sebesar 4.000 m.

- c) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 42,10 persen terdiri atas luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun hektar (ha) ditingkatkan hektar (ha)



direhabilitasi hektar (ha) dioperasikan dan pelihara sebesar 269 ha dan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Banjar sebesar 639 hektar (ha).

- d) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 50,38 persen terdiri atas jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Banjar sebanyak 93.549 dan jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten Banjar sebanyak 185.671.

- e) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 60,56 persen terdiri atas jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk ditambah jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT ditambah jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebesar 112.447 dan jumlah rumah di Kabupaten Banjar sebesar 185.671.

- f) Rasio kepatuhan IMB Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 100 persen terdiri atas jumlah pemanfaatan izin mendirikan bangunan yang sesuai peruntukannya sebanyak 91 dan jumlah izin mendirikan bangunan yang berlaku sebanyak 91.

- g) Tingkat kemandapan jalan Kabupaten

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 67,69 persen terdiri atas panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap sepanjang 528,90 km dan panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten Banjar sepanjang 781,39 km.

- h) Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 62,60 persen terdiri atas jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator



dan teknis/analisis sebanyak 626 dan jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten sebanyak 1.000.

- i) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Capaian kinerja dari indikator tersebut adalah 100 persen terdiri atas jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sebanyak 3 proyek dan jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak 3 proyek.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ada 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
Capaian indikator tersebut adalah 200 persen terdiri dari jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 2 unit dan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020 sebanyak 1 unit.
Pada awal perhitungan penganggaran (rencana) jumlah unit yang ditangani hanya 1 unit, namun ketika pelaksanaan anggaran tersebut dapat digunakan untuk 2 unit.
- b) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten
Capaian indikator tersebut adalah 100 persen terdiri dari jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan tambah Rumah Tangga penerima subsidi uang sewa tambah Rumah Tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 27 dan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan sebanyak 27.
- c) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar (ha) di Kab/ Kota yang ditangani
Capaian indikator tersebut adalah 20,15 persen terdiri dari luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar (ha) yang ditangani sebesar 24,09 hektar (ha) dan luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar (ha) sebesar 119,54 hektar (ha).



Setiap tahunnya Kabupaten Banjar terus berusaha mengurangi luas kawasan permukiman kumuh, namun dikarenakan keterbatasan anggaran maka pengentasan kawasan permukiman kumuh dilakukan secara tertahap

d) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Capaian indikator tersebut adalah 14,18 persen terdiri dari jumlah unit rumah tidak layak huni sebanyak 26.428 unit dan jumlah total unit rumah Kabupaten Banjar sebanyak 186.424 unit.

e) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Capaian indikator tersebut adalah 19,08 persen terdiri dari jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 35.575 unit dan jumlah unit rumah Kabupaten Banjar sebanyak 186.424 unit.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ada 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

a) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Capaian dari indikator tersebut adalah 100 persen yang terdiri atas jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 48 pengaduan dan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk sebanyak 48 pengaduan.

b) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Capaian dari indikator tersebut adalah 85,71 persen yang terdiri atas jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 30 dan jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 35.

Penegakan Perda/Perkada dilakukan ketika ada pelanggaran ataupun adanya aduan dari masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hanya ada 30 Perda/Perkada yang dilanggar, sedangkan 5 Perda/Perkada yang lainnya tidak ada pelanggaran.



- c) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Capaian dari indikator tersebut adalah 543.535 warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Warga negara yang mendapatkan layanan ini hanya warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana.

- d) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Capaian dari indikator tersebut adalah 543.535 warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Warga negara yang mendapatkan layanan ini hanya warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.

- e) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Capaian dari indikator tersebut adalah 3.365 warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Warga negara yang mendapatkan layanan ini hanya warga negara yang menghubungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS), dimana 1 Kecamatan terdapat 1 Operatornya.

- f) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Capaian dari indikator tersebut adalah 65 persen yang terdiri atas jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah tambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah sebanyak 39 layanan dan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Banjar sebanyak 60 kejadian.

Tidak semua kebakaran ditangani langsung oleh UPT Pemadam Kebakaran karena keterbatasan unit Mobil Pemadam Kebakaran dan luasnya wilayah Kabupaten Banjar, namun UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar tetap membantu dalam bentuk fasilitasi menghubungi Pemadam Kebakaran Swasta untuk dapat segera memadamkan api dalam kurun waktu kurang dari 15 menit.



g) Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran

Capaian dari indikator tersebut adalah 14 menit 60 detik waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran.

6. Urusan Sosial

Dalam penyelenggaraan Urusan Sosial ada 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tolak ukur pelaksanaannya di Daerah, yaitu :

a) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Capaian indikator tersebut sebesar 33,57 persen terdiri dari jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 18.049 jiwa dan populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis sebanyak 53.770 jiwa.

b) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator tersebut sebesar 49,11 persen terdiri dari jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran sebanyak 24.340 jiwa dan populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten sebanyak 49.561 jiwa.

IV. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

a. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar

Tabel 3 Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten Banjar

Tahun	Peringkat Kabupaten se Nasional	Skor	Kategori
2016	77 dari 396	3.2391	Sangat Tinggi
2017	104 dari 396	3.0100	Sangat Tinggi



2018	-	3.1105	Sangat Tinggi
2019*	-	3.5069	Sangat Tinggi

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Banjar (2021).

*= angka sementara

b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar

Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama 10 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 4 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2011-2020

No.	Tahun Anggaran	Opini atas Laporan Keuangan
1.	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10.	2020	Masih proses audit

V. RINGKASAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

a. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020

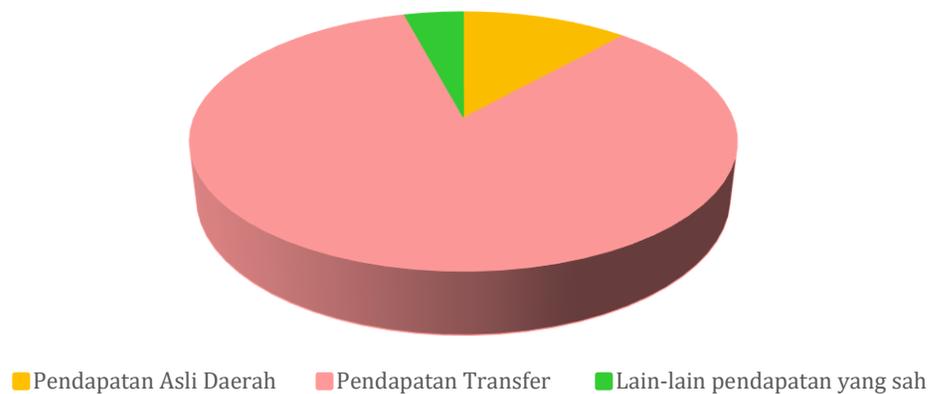
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020, realisasi pendapatan Kabupaten Banjar adalah Rp. 1.755.271.418.641,52. Persentase proporsi realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

- Pendapatan asli daerah realisasinya sebesar Rp. 206.230.417.569,52 dengan capaian 114,18%.
- Pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp. 1.475.863.986.072,00 dengan capaian 98,61%.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya sebesar Rp. 73.177.015.000,00 dengan capaian 111,90%.



Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan transfer/dana transfer masih dominan dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terkait komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020, bisa dilihat secara detail pada gambar berikut :

Gambar 1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020



Realisasi penerimaan atau pendapatan daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.755.271.418.641,52 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.742.683.147.171,00 atau 100,72%. Adapun realisasi masing-masing uraian pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terealisasi Rp. 206.230.417.569,52 atau sebesar 114,18% dari target sebesar 180.617.809.275,00 terdiri atas :

- Pendapatan pajak daerah terealisasi 76.884.288.781,00 atau sebesar 135,46% dari target sebesar Rp. 56.760.000.000,00.
- Pendapatan retribusi daerah terealisasi Rp. 5.123.544.758,50 atau sebesar 107,68% dari target sebesar 4.757.910.000,00.
- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan terealisasi Rp. 4.373.163.319,00 atau sebesar 40,59% dari target sebesar 10.773.163.319,00.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 119.849.420.711,02 atau sebesar 110,64% dari target sebesar Rp. 108.326.735.956,00.



2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima dengan realisasi 1.475.863.986.072,00 atau sebesar 98,61% dari target 1.496.668.234.936,00. Pendapatan transfer terbagi atas 3 (tiga) hal yaitu Pendapatan transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya, dan Pendapatan transfer Pemerintah Daerah lainnya.

- Pendapatan transfer pemerintah pusat (realisasi Rp. 1.107.101.678.205 dari anggaran Rp. 1.148.144.317.000,00 atau capaian 96,43%) terdiri atas : Bagi Hasil Pajak (realisasi Rp. 24.768.267.759,00 dari anggaran Rp. 24.589.392.000,00 atau capaian 100,73%); Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam (realisasi Rp. 161.510.099.703,00 dari anggaran Rp. 191.004.251.000,00 atau capaian 84,56%); Dana Alokasi Umum/DAU (realisasi Rp. 684.702.334.000,00 dari anggaran Rp. 689.489.862.000,00 atau capaian 99,31%); Dana Alokasi Khusus/DAK (realisasi Rp. 236.120.976.743,00 dari anggaran Rp. 243.060.812.000,00 atau capaian 97,14%).
- Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya (realisasi Rp. 259.170.847.000,00 dari anggaran 233.273.439.000,00 atau capaian 111,10%) terdiri atas : Dana Desa (realisasi Rp. 215.477.025.000,00 dari anggaran 215.477.025.000,00 atau capaian 100%); Dana Insentif Daerah (realisasi Rp. 43.693.822.000,00 dari anggaran 17.796.414.000,00 atau capaian 245,52%)
- Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya (realisasi Rp. 109.591.460.867,00 dari anggaran Rp. 115.250.478.936,00 atau capaian 95,09%) terdiri atas : Pendapatan bagi hasil pajak (realisasi Rp. 109.591.460.867,00 dari anggaran Rp. 115.250.478.936,00 atau capaian 95,09%).

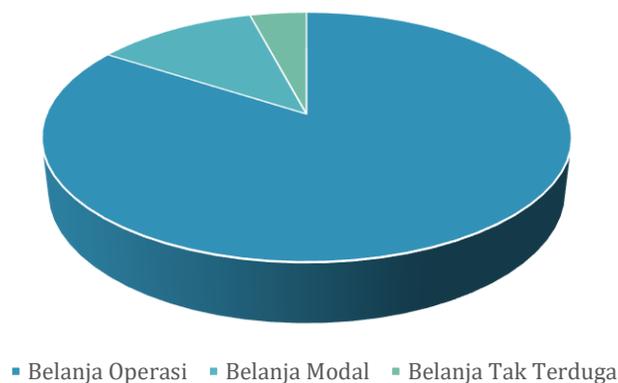
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi Rp. 73.177.015.000,00 atau sebesar 111,90% dari anggaran Rp. 65.397.102.960,00 terdiri atas : Pendapatan hibah (realisasi Rp. 73.177.015.000,00 dari anggaran Rp. 65.397.102.960,00 atau sebesar 111,90%).



b. Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020

Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar terdiri dari 1) belanja operasi 2) belanja modal 3) belanja tak terduga. Selama tahun 2020, belanja ini untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Banjar terealisasi sebesar Rp. 1.473.378.656.083,87. Dengan komponen belanja operasi 84,09% atau sebesar Rp. 1.239.086.972.456,98. Kemudian belanja modal 11,77% atau Rp. 173.429.470.080,50, selanjutnya belanja tak terduga sebesar 4,13% atau Rp. 60.862.213.546,39. Secara detail terkait komposisi pembagian komponen belanja dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020



Realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah Rp. 1.473.378.656.083,37 atau 92,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.590.680.794.746,76. Adapun realisasi masing-masing jenis pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi dengan realisasi Rp. 1.239.086.972.456,98 Atau 92,36% dari anggaran Rp. 1.341.655.962.673,76 terdiri atas : belanja pegawai (realisasi Rp. 599.640.350.207,00 dari anggaran Rp. 657.342.196.881,76 atau capaian 91,22%); belanja barang dan jasa (realisasi Rp. 534.857.038.019,98 dari anggaran Rp. 579.852.619.140,00 atau capaian 92,24%); Belanja hibah (realisasi Rp. 97.010.698.180,00 dari anggaran Rp. 98.957.996.652,00 atau capaian 98,03%); Belanja bantuan sosial (realisasi Rp. 7.578.886.050,00 dari anggaran Rp. 5.503.150.000,00 atau capaian 137,72%).



- 2) Belanja Modal dengan realisasi Rp. 173.429.470.080,50 Atau 95,97% dari anggaran Rp. 180.719.265.452,00 terdiri atas : belanja modal tanah (realisasi Rp. 2.930.252.335,00 dari anggaran Rp. 3.340.000.000,00 atau capaian 87,73%); belanja modal gedung dan bangunan (realisasi Rp. 43.947.525.081,00 dari anggaran Rp. 46.384.407.387,00 atau capaian 94,75%); belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (realisasi Rp. 53.708.960.430,00 dari anggaran Rp. 57.430.173.539,00 atau capaian 93,52%); belanja modal aset tetap lainnya (realisasi Rp. 4.172.040.924,00 dari anggaran Rp. 4.188.759.363,00 atau capaian 99,60%); belanja modal aset lainnya (realisasi Rp. 666.510.532,00 dari anggaran Rp. 676.021.032,00 atau capaian 98,59%).
 - 3) Belanja Tak Terduga dengan realisasi Rp. 60.862.213.546,39 atau 89,10% dari anggaran Rp. 68.305.566.621,00.
- c. Realisasi Transfer yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar
- Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 329.331.825.960,00 dengan capaian 99,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 331.342.876.752,00, yang merupakan transfer terdiri dari :
- 1) Transfer bagi hasil pendapatan dengan realisasi sebesar Rp. 4.588.942.728,00 dengan capaian 74,73% dari target sebesar Rp. 5.140.791.000,00 terdiri atas : transfer bagi hasil pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp. 4.216.848.750,00 dan capaian 74,29% dari target Rp. 5.676.000.000,00 dan transfer bagi hasil retribusi daerah dengan realisasi sebesar Rp. 372.093.978,00 dan capaian 80,06% dari target Rp. 464.791.000,00.
 - 2) Transfer bantuan keuangan dengan realisasi sebesar Rp. 324.742.883.232,00 dan capaian 99,86% dari target Rp.325.202.085.752,00 yang berasal dari transfer bantuan keuangan ke Desa.
- d. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan
- Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 179.340.524.327,76 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 179.340.524.327 atau 100% yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.



VI. INOVASI DAERAH

Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Banjar terus berusaha memberikan yang terbaik untuk warganya, diantaranya dengan terus menciptakan inovasi-inovasi pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu sebagai berikut :

Tabel 5 Inovasi Daerah Kabupaten Banjar

NO	JUDUL INOVASI	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD
1	Smart Koperasi Banjar	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	SIMANTAB (Sistem Informasi Keamanan, Ketentraman dan Keteriban)	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Kegiatan TAPILA (Tanggung Jawab Pihak Laki-Laki) di Wilayah Kerja Puskesmas Gambut	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
4	IVA MOBILE (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
5	GAMBUT BUNGAS (Gambut Bugar Sehat)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
6	PREMAN PENSIUN (Pemberian Pemahaman Pentingnya Sehat Sepanjang Tahun)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
7	LAPAT PAK RT UPT Puskesmas Gambut (Lakukan Pembinaan kepada Masyarakat pada Keluarga dan Kelompok Resiko Tinggi)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
8	SAMU HARUWAN (Sabtu Minggu Jamu Membuat Hari-Hari Ku Menawan)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
9	GALUH GAMBUT (Gerakan Lingkungan Bersih Gasan Masyarakat Gambut)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
10	ACIL IKAS (Apoteker Cilik Istimewa dan Cerdas)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
11	HALILING (Hari Keliling)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
12	Duta Anti Rokok Tahun 2019	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
13	KUTU BERAS (Kunjungi Balita Batuk Kesulitan Bernafas)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
14	TEH POCI (Temukan Penderita HIV melalui Kelompok Kunci)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)



NO	JUDUL INOVASI	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD
15	MAS RAMLAN (Puskesmas Ramah Lansia)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
16	HAI CINTA (Hallo Imunisasi Cerminan Peduli Balita)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
17	LABU MANIS (Lakukan Gerakan Tubuh untuk Mencegah Kencing Manis)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
18	LINTING POSYANDU (Peduli Stunting di Pos Pelayanan Terpadu)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
19	IWAK PAIS (Ini Waktunya Pencegahan Hepatitis)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
20	PAKASAM RANTAU (Pastikan Keluarga Sembuh Lantaran Terpantau)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
21	BERAS SIAM (Bergerak Aktifkan Selalu Surveilans Berbasis Masyarakat)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
22	LABU CEPER (Lakukan Gerakan Tubuh Cegah Hipertensi)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
23	DETEKTIF KUSTA (Deteksi Dini Efektif KUSTA) di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Gambut	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
24	MARIA GISELA (Mari Periksa Gigi Sehat Anak Cerdas)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
25	API UNGGUN (Aksi Pemeriksaan Jentik untuk Penanggulangan Kasus Penularan DBD)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
26	KAMPUNG SEHAT (Kader Mampu Pantau Tumbuh Kembang Anak Balita Sehat)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Gambut)
27	PELAKON OBAT (Penyediaan Layanan Konseling Obat)	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Martapura Timur)